

BAB I PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Populasi ternak di Indonesia tahun 2020 terdiri dari sapi potong sebanyak 17,4 juta ekor, kerbau 1,2 juta ekor, kambing sebanyak 18,7 juta ekor, domba 17,5 juta ekor, babi 7,6 juta ekor, ayam ras petelur 345,2 juta ekor, dan ayam ras pedaging 2,9 miliar ekor (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021). Pertumbuhan produksi daging di Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir untuk daging sapi tahun 2013 sebesar 505 ribu ton dan tahun 2020 sebesar 453 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 10,1%. Produksi daging ayam tahun 2013 sebesar 1,5 juta ton dan tahun 2020 sebesar 3,2 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 114,9%. Produksi telur mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,2 juta ton sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5,1 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 319,9%. Perkembangan partisipasi konsumsi masyarakat Indonesia untuk daging sapi, daging ayam dan telur dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2020 maka diperoleh angka partisipasi konsumsi daging sapi tahun 2013 sebesar 21,2% dan tahun 2020 sebesar 7,4% artinya terjadi penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 64,9%. Hal sebaliknya terjadi pada tingkat partisipasi konsumsi telur dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2013 sebesar 80,9% dan tahun 2020 sebesar 92,2% berarti terjadi kenaikan sebesar 13,9%, dan peningkatan partisipasi konsumsi juga terjadi pada daging ayam yaitu tahun 2013 sebesar 44% dan tahun 2020 sebesar 57,6% atau meningkat 30,8%. Dengan variabilitas pendapatan masyarakat, diversifikasi pangan asal ternak dengan kehadiran protein hewani berbasis telur dan daging ayam ras ini memberikan alternatif bagi konsumen dalam memilih sumber pangan hewani untuk dikonsumsi. Produksi telur Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Badan Ketahanan Pangan, 2021; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021; Soedjana, 2013).

Partisipasi konsumsi telur dan daging ayam meningkat didukung oleh permintaan yang besar karena kandungannya sebagai sumber energi, protein hewani dan mikronutrien esensial yang sangat diperlukan oleh tubuh. Selain itu, harga telur yang relatif terjangkau, mudah didapat dan disukai oleh semua lapisan masyarakat dengan latar belakang yang beragam, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan nutrisi global. Sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh terutama di negara-negara dengan permintaan telur dan daging ayam didorong oleh peningkatan pendapatan, dan urbanisasi (Sugandi *et al.*, 2017; Wahyono dan Utami, 2018; Hessel *et al.*, 2019).

Partisipasi produksi dan kebutuhan telur dan daging ayam yang sangat tinggi mengundang hadirnya berbagai pihak untuk berinvestasi dalam sektor ini, baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui penanaman modal



asing (PMA). Kehadiran industri peternakan dengan berbagai pola dan skala usaha. Ada yang hadir secara utuh/terintegrasi dari hulu sampai hilir (bibit, pakan, budidaya, pengolahan dan pemasaran), ada yang hadir hanya di perbibitan, dan ada yang hadir hanya di industri pakan. Kehadiran berbagai industri ini menyebabkan terjadinya gesekan antara aktor atau *stakeholders* yang terlibat di dalamnya sehingga terjadi kompetisi dan kontestasi dalam mempertahankan eksistensi dan kepentingan usahanya (Vicki Dwi Purnomo, 2023).

Keberadaan industri ayam ras dalam jumlah besar pada satu sisi memberikan keuntungan ekonomi seperti penyediaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan daerah, serta pada aspek pangan berupa kemudahan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Namun seiring dengan semakin berkembangnya sektor peternakan ayam ras, berkembang pula para pemain yang turut memanfaatkan peluang tersebut baik pembibit, pemodal, pembudidaya, pemasar, pemasok, pengolahan, dan aktor lainnya. Sehingga terjadi kontestasi baik dalam penyediaan input (bibit dan pakan) maupun pada aspek output (pengolahan dan pemasaran). Pada aspek yang lain juga terjadi kontestasi dalam penataan kebijakan dan peraturan terkait peternakan ayam ras di Indonesia. Kondisi ini juga terjadi di berbagai negara di dunia (Birhanu *et al.*, 2021; Conan *et al.*, 2012; Turkson dan Okike, 2016; Udoye *et al.*, 2019).

Walaupun berbagai peraturan dan kebijakan telah banyak diterbitkan oleh pemerintah namun tetap terjadi ketidakpuasan terutama dari para peternak skala kecil dan menengah. Ketidakpuasan ini disalurkan melalui gelombang demonstrasi yang terus dilakukan beberapa kali dalam setiap tahun dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Presiden Republik Indonesia secara khusus mengundang para pelaku demonstrasi dan pelaku usaha perunggasan ke istana dalam rangka mendengarkan permasalahan peternak secara langsung dan mencari solusi jangka panjangnya (kompas.com, 2021; liputan6.com, 2021; republik.co.id, 2021). Melihat masih adanya *gap* yang lebar antara peternak skala kecil, menengah dan besar (industri) sebagai dampak dari kontestasi para aktor dalam usaha peternakan ayam ras maka diperlukan berbagai upaya penyelesaian konflik kepentingan dengan cara harmonisasi antar peraturan yang ada. Disamping harmonisasi antara peraturan, hal yang perlu dikaji juga adalah implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, dan modifikasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha peternakan ayam ras yang sehat merupakan hal yang mesti dilakukan. Disamping itu, pemerintah juga dapat berperan penting dalam memperbaiki infrastruktur logistik yang saat ini membebani industri. Perbaikan infrastruktur jalan juga akan memungkinkan berat, yang selanjutnya mendorong modernisasi usaha dan n (Ferlito dan Respatiadi, 2018).



yang sudah berjalan di Indonesia yaitu ada industri yang sampai hilir dan berhadapan langsung dengan para peternak menengah) yang disebut dengan peternak mandiri, dan ada yang kemitraan usaha. Dalam rangka menata kembali usaha yang dampak kontestasi dalam bisnis peternakan ayam ras,

maka perlu dikaji dan dirumuskan pola usaha yang dapat mencerminkan tumbuhnya kontestasi usaha yang sehat dan mampu memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam usaha perunggasan ini. Pola dimaksud juga harus mampu menjamin keberlangsungan usaha perunggasan di masa yang akan datang untuk pelaku usaha berskala kecil, menengah dan besar.

Pelaku usaha peternakan ayam yang terdapat di Kabupaten Blitar sebanyak 3.267 peternak dengan total jumlah populasi ayam sebesar 15,9 juta ekor. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra peternakan ayam yang perlu dikembangkan. Pelaku usaha peternakan ayam paling banyak terletak di wilayah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 1.021 peternak dengan populasi ternak yang dipelihara sebesar 3,1 juta ekor. Sedangkan wilayah dengan pelaku usaha peternakan ayam paling sedikit terletak di wilayah Kecamatan Wlingi yaitu 31 peternak sedangkan wilayah dengan populasi ayam petelur paling sedikit yaitu di Kecamatan Selorejo sebanyak 75 ribu ekor. Data jumlah pelaku usaha peternakan ayam beserta populasi ayam Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Data pelaku usaha peternakan ayam ras petelur

No.	Kecamatan	Jumlah pelaku usaha	Jumlah populasi (ekor)
1	Bakung	169	590.890
2	Binangun	73	201.902
3	Doko	57	149.950
4	Gandusari	140	932.932
5	Garum	65	243.643
6	Kademangan	758	2.082.080
7	Kanigoro	36	226.626
8	Kesamben	66	120.220
9	Nglegok	222	493.393
10	Panggungrejo	42	415.815
11	Ponggok	1.021	3.118.415
12	Sanankulon	59	312.312
13	Selopuro	205	806.906
14	Selorejo	38	75.676
15	Srengat	363	2.093.592
16	Sutojayan	43	153.153
17	Talun	198	1.990.689
18	Udanawu	173	692.392
19	Wates	144	185.385
20	Wlingi	31	109.610
21	Wulung	247	802.602
22	Wulungrejo	38	128.228
		3.267	15.926.411

Blitar, Kabupaten Blitar, 2024



Kabupaten Blitar merupakan produsen utama telur ayam di Indonesia dengan populasi ayam petelur yang hampir mencapai 15,9 juta ekor dan peternak yang mencapai 3.267 orang pada tahun 2023. Potensi ini yang kemudian menumbuhkan pelaku usaha (aktor) lain dalam menunjang usaha budidaya peternakan ayam dari sektor hulu hingga hilir. Aktor dalam konteks penelitian ini merupakan pelaku yang dapat berinteraksi satu sama lain dengan membawa kepentingannya atau perannya masing-masing sehingga terbentuk suatu pola interaksi yang berbeda-beda. Suatu pola interaksi terdiri atas elemen penting diantaranya yaitu aktor (*node*) tidak selalu berupa individu bisa juga organisasi, negara, institusi lainnya (Scott et al., 2015). Aktor bisa bersifat sebagai link (*edge*) yaitu relasi antar aktor yang dilambangkan dalam satu garis yang menghubungkan antar aktor. Selain itu, jika merujuk pada aktor yang mempunyai koneksi paling banyak dalam jaringan atau *hubs*, aktor dapat menjadi perekat dari jaringan (*cut points*), sehingga bila tidak terdapat aktor ini maka jaringan akan terpecah (Borgatti et al., 2013). Para aktor tersebut dalam jaringan komunikasi yang terbentuk dari usaha ayam ras petelur adalah sebagai upaya dalam mendapatkan berbagai informasi baik teknologi, perkembangan usaha dan berbagai kebijakan dengan cara mencari, menerima, dan menyebarkan kembali serta menyaring berbagai informasi tersebut untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha ayam ras petelurnya.

Identifikasi aktor yang terlibat dalam usaha tersebut yaitu: (1) peternak kecil, (2) peternak sedang, (3) peternak besar, (4) kelompok tani ternak, (5) poultry shop, (6) dinas peternakan, (7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (8) perusahaan pakan/obat-obatan, (9) pengepul/tengkulak telur, (10) pedagang lokal, (11) pedagang antar daerah/pulau, dan (12) koperasi, membawa kepentingan masing-masing. Kontestasi para aktor terjadi dalam perolehan DOC/pullet, pemasaran, serta layanan kesehatan hewan. Tujuan akhir dari setiap kontestasi membawa kepentingan tercapainya keuntungan yang maksimal dari usaha/bisnis ayam ras. Bagi peternak sendiri, kepentingan utamanya adalah mencapai skala efisiensi usaha untuk menjamin keberlanjutan usaha ternaknya.

Secara khusus Kabupaten Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan: (1) Sebagai salah satu penyangga produksi telur ayam ras di Indonesia yang sudah dilakukan secara turun-temurun, (2) Aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam sangat beragam dan membawa kepentingan berbeda, (3) Kontestasi antar aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur sangat nyata mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Indikasi eksistensi kelompok kuat yang mampu bertahan dan mematkan erlukan rekomendasi kebijakan perlindungan pemerintah peternakan yang sesuai dengan nilai ekonomi kerakyatan. tikan relasi kuasa dan kepentingan dari para aktor, maka ontestasi aktor dalam usaha peternakan ayam ras petelur di anjadi sangat penting dan menarik untuk dilakukan.



1.2 Rumusan Masalah

Mencermati berbagai perkembangan usaha peternakan ayam ras petelur dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- A. Belum adanya gambaran peran dan kuasa para aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
- B. Belum adanya investigasi hubungan atau relasi antar aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
- C. Belum adanya kajian pada tingkat kontestasi antar aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran dan kuasa aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur?
- 2) Bagaimanakah relasi antar aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur?
- 3) Bagaimanakah kontestasi aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang terjadi pada usaha peternakan ayam ras di Indonesia dan untuk menjawab permasalahan tersebut, dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- A. Menganalisis peran dan kuasa aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur
- B. Menganalisis relasi-kuasa antar aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
- C. Menganalisis kontestasi aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur mulai dari hulu, budidaya, dan hilir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.



Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam usaha peternakan ayam ras petelur yang memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam penataan regulasi dan kebijakan tentang usaha peternakan ayam ras petelur di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aktivitas usaha peternakan ayam ras petelur sebagai bagian dari agribisnis perunggasan dan agribisnis peternakan. Dalam hal ini akan mencakup identifikasi aktor, relasi-kuasa antar aktor dan kontestasi para aktor yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur, baik skala kecil, menengah, dan besar. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

1.6 Kebaruan Penelitian

Berbagai penelitian mengenai kontestasi aktor telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan beragam tema spesifik. Penelitian oleh Schilling *et al.* (2021) mengenai tata kelola sumber daya alam tak terbarukan dalam hubungannya dengan keamanan masyarakat lokal di Kenya, Bolivia dan Peru dengan metode dan perbandingan memperlihatkan inisiatif tata kelola sumberdaya alam harus memastikan memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan keamanan manusia di lokasi tambang dalam tiga dimensi keamanan yaitu lingkungan, ekonomi dan politik. Penelitian yang dilakukan Febryano *et al.* (2015) dengan metode studi kasus di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terkait dengan aktor dan relasi kuasa dalam pengelolaan mangrove mengusulkan perlu pengembangan jejaring yang lebih luas melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, untuk mendorong kesadaran pengusaha tentang pentingnya fungsi dan manfaat mangrove terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budidaya udang serta mata pencaharian masyarakat. Dalam perspektif pendekatan, kolaborasi berarti cara atau metode yang berguna untuk menciptakan keadaan dimana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam tahap-tahap pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan, baik lokal, daerah maupun nasional (Salman, 2012). Schrage (2019) dengan metode studi lapangan di prefektur Miyazaki (Jepang) meneliti bagaimana eksistensi ayam lokal Jepang (jidori) yang masih memiliki tingkat kepercayaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan ayam impor dan rela membayar harga yang lebih tinggi. Caffyn (2021) dengan metode studi lapangan meneliti bagaimana peternakan unggas intensif di Inggris mendapat tantangan dari aspek lingkungan, ekonomi dan kesehatan, serta merekomendasikan berbagai usulan pendekatan dalam rangka pengembangan peternakan intensif. Pendekatan ekologi politik tidak hanya digunakan dalam sistem produksi unggas, tetapi juga untuk komoditas susu dan produk susu. Clay dan Yurco (2020) dengan metode studi pustaka meneliti bagaimana keterkaitan komoditas ini dengan isu-isu kelestarian lingkungan, pembangunan pedesaan, kesejahteraan hewan



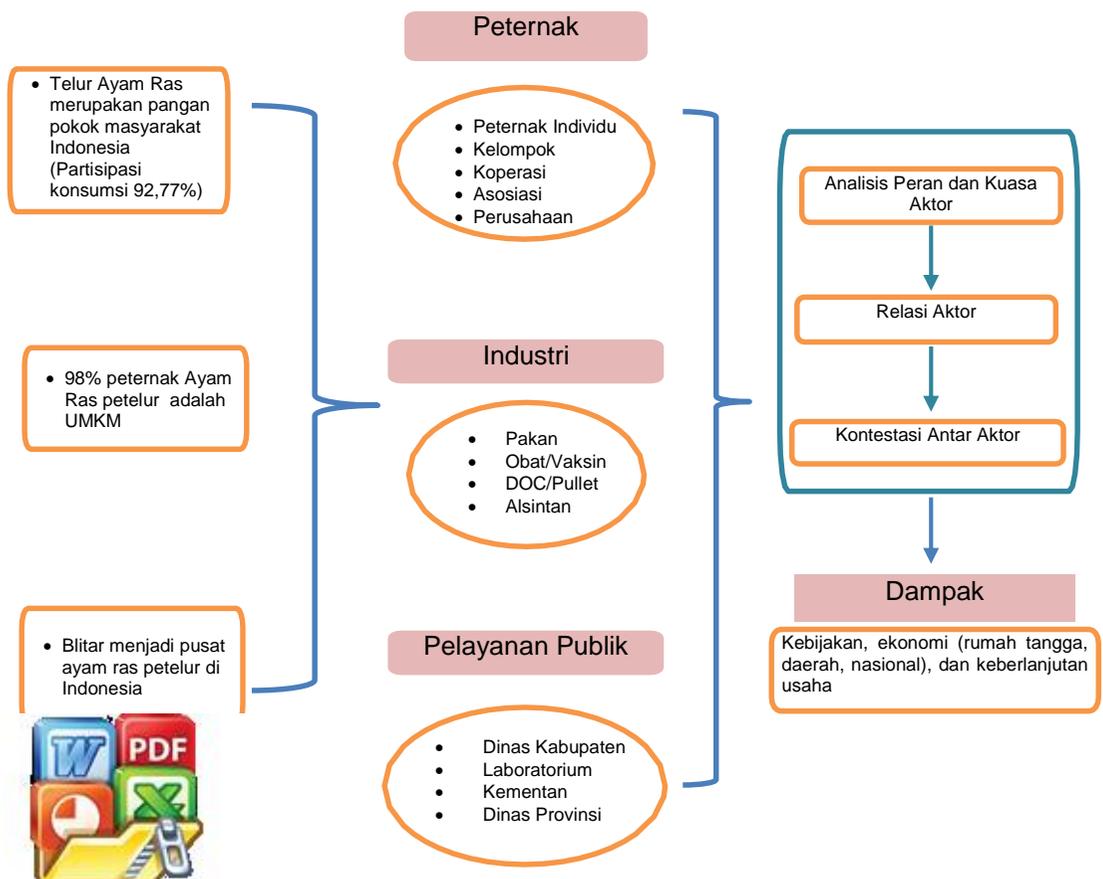
dan kesehatan manusia.

Berbagai penelitian mengenai kontestasi aktor telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas spesifik mengenai peternakan ayam ras petelur. Penelitian ini akan membahas mengenai kontestasi aktor dalam memperoleh agroinput mulai dari tingkat hilir dalam memperoleh akses DOC/pullet, pakan dan kesehatan ayam. Hal ini sangat penting mengingat dalam sistem produksi ayam ras petelur, tingkat akses agroinput ini menyumbang 79,84%

dari total biaya produksi. Penelitian ini juga membahas kontestasi aktor pada aspek hilirisasi. Aspek hilirisasi ini sangat penting mengingat harga telur ayam ras terutama di sentra produksi seringkali mengalami fluktuasi yang tajam.

1.7 Kerangka pikir

Penelitian ini melihat pola keterlibatan dan interaksi berbagai aktor dalam rantai nilai usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar. Penelitian ini juga menyoroti peran dan kuasa berbagai aktor dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi telur ayam ras, yang telah menjadi salah satu pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Telur ayam ras menjadi pangan pokok masyarakat Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya industri ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi nasional. Telur ayam tidak hanya merupakan sumber protein yang terjangkau, tetapi juga sangat mudah diakses oleh masyarakat di berbagai lapisan. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap telur ayam sebagai bagian dari pola konsumsi pangan pokok, keberlanjutan rantai produksi menjadi semakin krusial.



Gambar 1.1. Alur pikir penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aktor kunci yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan ayam ras petelur, yaitu:

- a. Industri: Produsen DOC, pakan dan obat-obatan dari sektor industri berperan dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi peternak. Industri ini memberikan kontribusi pada kualitas input yang akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas ayam petelur.
- b. Poultry Shop: Berperan sebagai penyedia kebutuhan peternak
- c. Koperasi: Berperan sebagai perantara antara peternak dan pasar, menyediakan akses lebih mudah terhadap input serta berfungsi sebagai penyedia informasi pasar.
- d. Kelompok Tani Ternak: Kelompok tani ternak memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan peternak kecil, memperkuat daya tawar kolektif, serta memudahkan akses ke dukungan teknis dan keuangan.
- e. Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota: Pemerintah melalui berbagai instansi bertanggung jawab dalam memberikan regulasi, dukungan teknis, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha peternakan skala kecil. Pemerintah juga bertindak sebagai regulator yang mengawasi agar praktik budidaya sesuai dengan standar kesehatan dan kesejahteraan hewan.
- f. Penyuluh dan Pedagang: Penyuluh berperan sebagai pendamping teknis bagi peternak,
- g. Pedagang: Penghubung utama antara peternak dan konsumen, memastikan distribusi telur ayam ke pasar berjalan lancar.
- h. Peternak Individual: Peternak perorangan merupakan pelaku utama dalam budidaya ayam ras petelur yang menentukan kualitas dan kuantitas produksi telur.

Kontestasi aktor melibatkan tiga fase utama dalam rantai produksi telur ayam ras petelur, yaitu hulu, budidaya, dan hilir. Kontestasi di sini menggambarkan bagaimana masing-masing aktor berinteraksi, berkolaborasi, ataupun bersaing untuk mempertahankan perannya di setiap fase ini. Hulu, pada fase ini, fokusnya adalah pada penyediaan input dasar seperti DOC, pakan, dan obat-obatan. Aktor yang terlibat dalam fase ini termasuk industri penyedia pakan, poultry shop, dan koperasi yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar bagi peternak. Budidaya, fase budidaya melibatkan proses pemeliharaan ayam petelur, di mana peran peternak individu atau kelompok ternak sangat penting dalam memastikan produktivitas yang optimal. Penyuluh dari dinas terkait juga



berikan pelatihan dan dukungan teknis. Hilir, pada fase hilir, telur ayam didistribusikan dan dijual melalui berbagai saluran oleh pedagang maupun melalui koperasi, untuk menjangkau se ini, harga dan kualitas produk sangat berpengaruh terhadap erlanjutan usaha. Setiap aktor berkontribusi pada keberhasilan m ras petelur, dan interaksi mereka membentuk jaringan yang ndukung industri ini.

Kontestasi ini menggambarkan kompleksitas dalam mengelola rantai produksi telur ayam ras petelur di Indonesia, terutama karena banyaknya aktor dengan kepentingan berbeda. Kontestasi ini mencerminkan dinamika dan ketegangan yang mungkin muncul ketika berbagai aktor mencoba untuk mendapatkan keuntungan atau mempertahankan pengaruhnya dalam rantai nilai. Kontestasi ini dapat berupa:

- a. Perebutan sumber daya seperti jagung untuk pakan, terutama saat harga bahan baku naik.
- b. Perebutan pasar antara produk telur dari peternak lokal/kecil dan produk telur dari peternak besar atau korporasi.
- c. Intervensi regulasi pemerintah dalam menentukan harga atau mengendalikan pasokan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan peternak.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa keberlanjutan industri peternakan ayam ras petelur membutuhkan sinergi antara berbagai aktor, mulai dari industri, pemerintah, koperasi, kelompok ternak hingga peternak individual. Penelitian ini bisa memberikan dasar untuk memahami bagaimana kebijakan dan strategi yang tepat dapat mendukung peternak kecil sehingga dapat terus bertahan dan tumbuh.



BAB II

ANALISIS PERAN DAN KUASA AKTOR DALAM USAHA PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Abstrak

Sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor strategis karena menguasai kebutuhan paling asasi manusia terkait akses terhadap ketersediaan pangan. Usaha ternak ayam melibatkan aktor lokal, regional dan global yang memainkan peran strategis sesuai posisi mereka masing-masing. Peran tersebut bisa berjalan beriringan, tumpang tindih, namun juga mampu mengakibatkan konflik kepentingan baik di tingkat aktor maupun institusi. Peternak mandiri sangat dipengaruhi oleh kepentingan aktor dan lembaga yang bermain dalam peternakan ayam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kuasa aktor dalam peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang dipilih secara *purposive* di Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu sentra peternakan ayam petelur terbesar di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. Informan penelitian terdiri dari peternak mandiri (peternak skala besar, menengah, dan kecil), peternak mitra, *poultry shop*, investor, pemasar, dinas terkait, dan pengurus koperasi. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelaku utama dalam bisnis ayam ras petelur yaitu investor, peternak, pengolah, pemasok, pemasar, dan dinas peternakan, dengan tiga struktur usaha meliputi hulu, *on farm* (budidaya), dan hilir. Peternakan mandiri banyak diterapkan oleh peternak di Kabupaten Blitar yang usahanya rentan terdampak oleh kenaikan harga *Day Old Chicken* (DOC), pakan, obat-obatan, hingga fluktuasi harga telur. Keberadaan aktor dan lembaga menimbulkan kolaborasi dan kompetisi dalam penyediaan DOC, pakan, dan bahkan dalam pemasaran telur secara berkelanjutan. Terdapat ketimpangan kuasa yang signifikan di antara para aktor. Aktor dengan kuasa terbesar adalah perusahaan DOC, perusahaan pakan, dan perusahaan oba, karena mereka menguasai input utama yang menentukan keberlanjutan produksi. Peternak kecil, kelompok tani ternak, dan *poultry shop* memiliki tingkat kuasa rendah karena sangat bergantung pada pasar, input produksi, dan kebijakan yang ditentukan oleh aktor yang lebih kuat

2.2 Pendahuluan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ogi menyatakan bahwa otonomi daerah dapat mengancam kehidupan utamanya kewenangan perizinan untuk suatu usaha di suatu daerah. Hal ini terjadi karena selama ini usaha tersebut berada di pemerintah daerah yang tak diperhitungkannya berbagai dampak lingkungan serta dapat peran serta masyarakat lokal, kerusakan lingkungan dan iklim. Padahal otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih

mempermudah urusan dan lebih dekat kepada peran serta masyarakat lokal (Muharram et al., 2021; Purnomo et al., 2021; Svarstad et al., 2018; Widianarko, 2009). Kenyataannya desentralisasi yang diberikan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat banyak diberikannya izin-izin usaha, termasuk dalam hal ini perijinan usaha di sub sektor peternakan. Populasi unggas di Indonesia yang terdiri dari ayam ras pedaging, petelur, ayam buras, itik, dan burung puyuh merupakan aset terbesar dari keseluruhan agribisnis peternakan. Jumlah ternak ini lebih dari 3 miliar ekor (Nurfaidah dan Rusdiyana, 2020).

Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, produksi ayam petelur di Indonesia sekitar 1,6 juta ton pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 1,88 juta ton pada tahun 2021. Sayangnya, banyaknya aktor dan institusi yang bermain di peternakan ini membuat bisnis menjadi kompleks dan mengarah pada kontestasi antara satu dan lainnya menjadi kompleks pula (Caffyn, 2021; Dijk et al., 2019; Saragih et al., 2020). Perusahaan besar semakin dominan dalam hal penyediaan DOC, sarana produksi peternakan seperti pakan ternak, obat-obatan, vaksin, dan pemasaran (Kidd & Anderson, 2019; Pelletier et al., 2018). Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar (2021) menyebutkan bahwa keberadaan lembaga memainkan peran strategis dalam mencukupi kebutuhan dengan melibatkan pola kegiatan yang lahir dari aspek sosial untuk memenuhi kebutuhan anggota tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Meskipun memiliki kearifan lokal, para petani dalam usahatani berusaha beradaptasi dengan perubahan iklim. Penyuluh pertanian sering membantu dalam konteks mengubah perilaku adaptif, meskipun petani sering memiliki persepsi yang berbeda karena petani menggunakan perspektif pengalaman mereka. Kemitraan diharapkan menjadikan para pelaku usaha tani saling menguntungkan. Namun sayangnya, petani memiliki pilihan sendiri dalam menentukan pilihan terhadap usaha taninya, termasuk pilihan kelompok, karena kelompok tani seringkali berperan dalam pengambilan keputusan petani (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020; Febriandika *et al.*, 2017; Hermanto & Swastika, 2016; Indonesia, 2014; Reviandy *et al.*, 2021; Rusdiana *et al.*, 2019). Kesenjangan antar pelaku dalam usaha peternakan ini penting untuk dikaji. Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pelaku dan institusi, serta perannya masing-masing dalam usaha peternakan ayam ras petelur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan menyatakan bahwa jenis usaha peternakan dibagi menjadi empat skala usaha yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Skala usaha budidaya ayam ras terdiri dari mikro (<1.000-11.500 ekor); menengah (11.500–230.000 ekor); dan besar



pada skala mikro biasanya dikelola oleh individu atau odal dan lahan yang terbatas. Kegiatan peternakan ini sering usaha sampingan atau tambahan untuk pendapatan rumah adalah peternakan kecil di halaman belakang rumah atau

lahan kecil yang dikelola secara tradisional.

Usaha peternakan pada skala kecil mulai menunjukkan pengelolaan yang lebih sistematis dibandingkan skala mikro. Pemilik usaha pada skala ini biasanya mulai menginvestasikan modal lebih untuk peningkatan fasilitas dan pengelolaan ternak yang lebih baik. Contohnya adalah peternakan ayam petelur yang dikelola secara intensif dengan kandang yang lebih baik dan manajemen pakan yang lebih teratur.

Peternakan skala menengah sudah beroperasi dengan manajemen yang lebih profesional. Pada skala ini, teknologi peternakan mulai diterapkan, termasuk dalam hal pakan, kesehatan hewan, dan produktivitas ternak. Biasanya memiliki tenaga kerja yang lebih banyak dan operasional yang lebih kompleks. Contohnya adalah peternakan ayam petelur dengan kandang baterai modern, sistem pemeliharaan otomatis, dan penerapan teknologi pakan dan kesehatan yang canggih.

Usaha peternakan skala besar merupakan usaha yang sudah sangat profesional dengan pengelolaan yang intensif dan penggunaan teknologi tinggi. Pada skala ini, peternakan beroperasi dengan standar manajemen internasional, memiliki infrastruktur yang lengkap, serta sistem produksi yang sangat efisien. Contohnya adalah perusahaan peternakan besar yang memiliki beberapa lokasi peternakan, menggunakan teknologi canggih untuk manajemen produksi, pakan, dan kesehatan hewan, serta memiliki kapasitas produksi yang sangat tinggi.

Dengan adanya klasifikasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skala usaha peternakan ayam ras petelur di Indonesia serta membantu dalam penyusunan kebijakan yang tepat guna mendukung perkembangan sektor peternakan ini.

2.3 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali permasalahan yang sedang diteliti. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan memilih Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Latar belakang memilih Kabupaten Blitar karena Kabupaten ini merupakan salah satu daerah produsen telur ayam terbesar di Provinsi Jawa Timur, (dijuluki sebagai sentra produk unggas) dengan jumlah peternak rakyat mencapai 7.372 peternak dan pada skala perusahaan mencapai 436 usaha. Total populasi ayam ras petelur dari peternak di daerah tersebut telah mencapai 22 juta ekor, sehingga mampu menjadi penyumbang telur sebanyak 30 persen untuk kebutuhan nasional (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020).

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi serta *focus group discussion* (FGD). Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan informasi dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peternakan, Data Kementerian Pertanian, data kelompok tani serta asosiasi peternak. Informan kunci dalam penelitian ini adalah peternak skala besar, peternak skala menengah, dan peternak skala kecil. Penelitian ini didukung terdiri atas Dinas Peternakan, asosiasi peternak,



koperasi, *poultry shop*, serta tengkulak. Validitas data ditentukan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari semua informan kunci maupun informan pendukung. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi serta FGD. Selanjutnya analisis data dilakukan menggunakan analisis model interaktif yang dimulai dari pengumpulan, analisis serta penyajian data.

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1. Peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar

Usaha peternakan ayam ras petelur merupakan usaha yang telah dijalankan masyarakat Kabupaten Blitar sejak awal tahun 1970-an dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Vidyatmoko dan Rosadi (2015) menyatakan bahwa skala usaha merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan wirausaha. Berdasarkan rataan populasi yang dipelihara setiap peternak di atas 1.000 ekor, skala usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar terdiri dari skala kecil, menengah, dan besar. Skala usaha dipengaruhi oleh modal yang dimiliki, nilai agunan kredit yang bisa dijaminkan, dan jaringan mitra atau pasar. Peternak mikro, kecil, dan menengah pada umumnya memperoleh modal usaha dari modal sendiri dan sering mendapat tambahan dari kredit perbankan. Peternak besar memiliki nilai aset yang jauh lebih besar sehingga lebih mudah mendapatkan akses modal perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tabel 2.1. Populasi ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan ayam buras

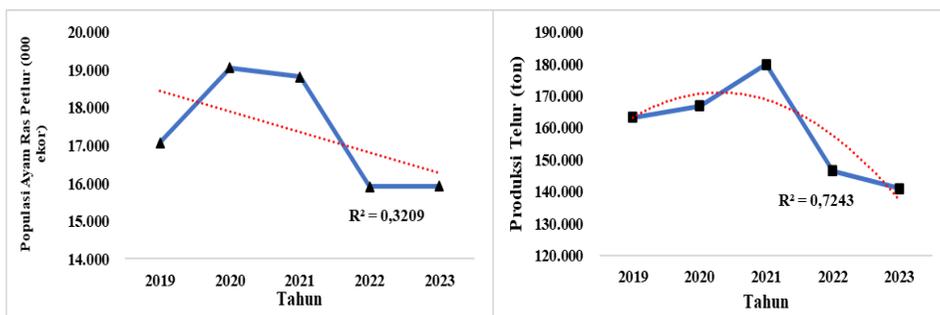
No	Kecamatan	Populasi (ekor)					
		Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Ponggok	2.907.100	3.115.300	3.118.415	378.000	161.000	236.600
2	Kademangan	2.833.000	2.080.000	2.082.080	258.000	149.000	201.110
3	Srengat	2.491.600	2.091.500	2.093.592	198.700	454.500	236.600
4	Wonodadi	2.491.600	801.800	802.602	78.000	226.000	153.790
5	Talun	1.507.600	1.988.700	1.990.689	204.000	468.000	159.705
6	Udanawu	1.183.900	691.700	692.392	97.200	432.400	201.110
7	Nglegok	1.086.500	492.900	493.393	237.000	158.000	189.280
8	Kanigoro	997.200	226.400	226.626	63.000	321.000	384.475
9	Gandunsari	822.000	932.000	932.932	232.500	526.300	591.5002
10	Garum	704.000	243.400	243.643	232.500	167.500	414.050
11	Sanankulon	636.100	312.000	312.312	120.000	440.000	189.280
12	Selopuro	350.300	806.100	806.906	196.000	432.000	147.875
13	Doko	109.800	149.800	149.950	17.700	405.900	118.300
14	Bakung	93.000	590.300	590.890	23.400	206.800	295.750
		92.500	109.500	109.610	276.000	92.000	59.150
		89.200	185.200	185.385	78.000	218.000	414.050
		87.000	120.100	120.220	199.200	256.400	591.500
		86.200	75.600	75.676	197.700	255.900	946.400
		85.100	153.000	153.153	38.100	210.700	177.450
		77.000	128.100	128.228	55.800	212.600	82.810
		47.700	415.400	415.815	26.400	206.800	236.600
		39.600	201.700	201.902	189.600	353.200	236.600



JUMLAH	18.818.300	15.910.500	15.926.411	3.396.800	6.354.000	6.263.985
--------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, 2024

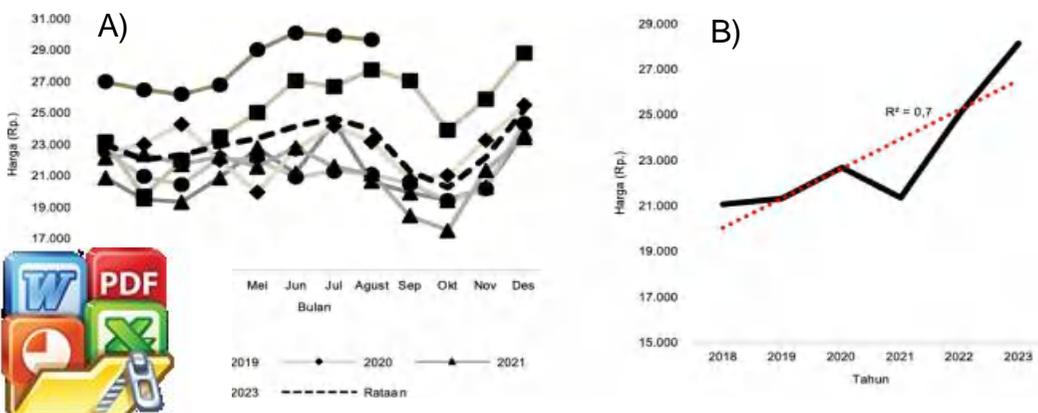
Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa komoditas ayam yang dibudidayakan oleh peternak di Kabupaten Blitar didominasi oleh ayam ras petelur dibandingkan dengan ayam ras pedaging. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata populasi ayam ras petelur per tahun di Kabupaten Blitar pada periode 2021–2023 di kisaran 15,9 –18,8 juta ekor. Populasi tersebut lebih tinggi dibandingkan populasi ayam ras pedaging 3,3 – 6,3 juta ekor.



Gambar 2.1. Populasi dan produksi: (A) populasi ayam ras petelur dan (B) produksi telur ayam ras

Gambar 2.1 di atas menunjukkan grafik populasi dan produksi, dimana pada bagian A menunjukkan bahwa populasi ayam ras petelur di Kabupaten Blitar menurun dari 17 juta ekor pada tahun 2019 menjadi 16 juta pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tren penurunan populasi ayam dengan rata-rata penurunan 6,25% per tahun (R^2 0,32).

Gambar 2.1 (B) menunjukkan adanya tren peningkatan produksi telur ayam ras dengan rata-rata menurun 3,95% per tahun (R^2 0,72). Produksi telur meningkat dari 2019 hingga 2021 kemudian menurun hingga 2023. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan populasi ayam ras petelur.



rataan harga telur: (A) Rataan harga telur per bulan, (B)

Rataan harga telur per tahun

Berdasarkan rata-rata harga telur ayam ras bulanan (gambar 2.2 bagian A), diketahui bahwa terbentuk pola pergerakan harga yang sama setiap tahunnya. Harga telur mengalami penurunan pada Januari–Maret dan mengalami peningkatan pada April–Agustus. Harga telur akan kembali mengalami penurunan pada September–Oktober, dan naik kembali pada November–Desember. Berdasarkan rata-rata harga telur tahunan (Gambar 2.2 bagian B), terjadi tren meningkat pada periode 2018–2023. Rataan harga telur ayam ras Januari–Agustus 2023 mencapai Rp. 28.100 per kg, merupakan rata-rata harga tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Fluktuasi harga telur dipengaruhi beberapa faktor seperti peningkatan permintaan pada musim tertentu, ketersediaan pasokan telur, dan keterbatasan informasi di tingkat peternak. Sedangkan menurut Yuhuan dan Fu (2018) pada penelitian di China beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi harga telur ayam yaitu pengaruh jumlah pengembangbiakan ayam petelur, kenaikan biaya produksi ayam petelur, teknologi informasi, kebijakan perlindungan lingkungan pemerintah, serta produksi telur di peternak.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan populasi ayam ras petelur di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 dan 2022 yaitu adanya pandemi Covid-19 yang membuat mobilitas orang terbatas sehingga usaha stagnan dan terjadi fluktuasi harga. Pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan populasi dan produksi dibanding tahun 2019. Peningkatan populasi dan produksi ini menyebabkan terjadinya *over supply* sehingga terjadi guncangan harga (harga jatuh) dan para peternak banyak mengalami kerugian. Sebagai upaya mempertahankan usaha sebagian peternak mengafkir ayamnya sehingga terjadi keseimbangan *supply* dan *demand*, hal ini terlihat pada gambar 2.2 dimana harga telur pada tahun 2022 dan 2023 meningkat di atas rata-rata.

Beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan populasi diantaranya yaitu permintaan telur yang cenderung meningkat, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan teknis peternak, dan nilai profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan usaha pertanian atau perkebunan. Menurut Heise *et al.* (2015), peningkatan preferensi masyarakat terhadap produk unggas dapat dikaitkan dengan keunggulan ekologi, ekonomi, sosial, dan kesehatannya dibandingkan jenis makanan lainnya. Peningkatan produksi dan populasi untuk memenuhi tingkat konsumsi merupakan peluang yang perlu diambil oleh seluruh *stakeholders* (Wahyono & Utami, 2018).

Pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar ditangani secara serius oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembinaan dan pendampingan dalam upaya meningkatkan produksi telur dan penjualan telur baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan agar usaha peternakan berjalan tertib. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 18 tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengawasan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Lokasi tempat objek pengawasan yang dituju dan secara tidak



langsung melalui penyampaian laporan secara tertulis. Peraturan daerah ini mengelompokkan usaha peternakan menjadi dua, yaitu perusahaan peternakan dan peternakan rakyat. Kategori perusahaan peternakan memiliki ternak ayam diatas 10.000 ekor, sedangkan peternakan rakyat, populasi ayam antara 1.000 sampai 10.000 ekor ayam.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik merupakan peraturan teknis yang merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak. Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan budi daya ayam pedaging dan petelur yang baik. Selain itu, peraturan Menteri ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu ketika proses pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya. Subjek dari pengamatan implementasi dari Peraturan Menteri tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik sesuai yang disebutkan dalam isi peraturan tersebut yaitu peternak sebagai pelaku utama dalam menjalankan usaha ternak serta Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar sebagai pengawas dan pembina usaha peternakan.

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak dilakukan melalui beberapa kebijakan yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan setempat. Kebijakan dari aspek hulu yang telah dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk menstabilkan harga telur dan ayam, yaitu dengan melakukan pengaturan keseimbangan *supply* dan *demand* sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3035 Tahun 2017. Selain itu, untuk mendukung kelancaran pengaturan keseimbangan *supply* dan *demand*, dilakukan juga pemantauan dan monitoring secara berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak. Upaya yang dilakukan pemerintah, terutama dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak, diantaranya dukungan regulasi, pembinaan/motivasi, dan transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Pemerintah bersama pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan pembinaan terpadu melalui pendataan populasi dan produksi, mendorong terbentuknya koperasi, menjalin koordinasi ketersediaan jagung dengan harga terjangkau, pendekatan kepada lembaga keuangan di Kabupaten Blitar terkait aspek permodalan, memberikan dukungan regulasi pada aspek hulu (revisi Permentan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras) dan hilir khususnya harga telur melalui penerbitan harga acuan sejak tahun 2022 ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional



Peran Peternak sebagai aktor dalam usaha peternakan ayam ras petelur

usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yang semakin

menjanjikan telah mendorong pertumbuhan usaha peternakan ayam ras petelur, termasuk pihak-pihak (para aktor) yang terlibat. Setiap aktor memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dengan aktor lainnya (Caffyn, 2021; Hakim, 2019; Iyai et al., 2021; Klerkx et al., 2010; Mbiri & Kushandajani, 2020; Pelletier et al., 2018; Salman et al., 2021; Udoye et al., 2019). Hasil penelitian ini menjabarkan aktor yang terlibat dalam kelembagaan dan usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar.

Para aktor yang terlibat dalam kontestasi usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar dan peran dari masing-masing aktor dijabarkan sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Aktor dan perannya dalam usaha peternakan ayam ras petelur

No	Aktor	Peran	Kuasa
1	Peternak Kecil	Individu yang menguasai dan memelihara ternak di bawah 11.500 ekor.	Peternak kecil memiliki tingkat kuasa yang relatif rendah dalam rantai pasok. Mereka sering bergantung pada harga pasar yang ditentukan oleh pedagang atau pengumpul. Mereka juga rentan terhadap fluktuasi harga pakan dan biaya operasional.
2	Peternak Menengah	Individu yang menguasai dan memelihara ternak antara 11.500–230.000 ekor.	Lebih besar dibandingkan peternak kecil, tetapi masih terbatas. Mereka mulai memiliki akses yang lebih baik ke pemasok pakan dan obat, serta dapat bernegosiasi lebih baik dengan pedagang.
3	Peternak Besar	Individu yang menguasai dan memelihara ternak di atas 230.000 ekor.	Peternak besar memiliki pengaruh signifikan dalam pasar lokal, regional, bahkan nasional. Mereka dapat menjalin kontrak langsung dengan koperasi, perusahaan pakan, atau distributor besar.
4	Kelompok Tani Ternak	Gabungan peternak yang memiliki dan memelihara ternak secara bersama-sama untuk tujuan yang sama	Relatif kecil, tetapi bisa menjadi signifikan jika mereka memiliki organisasi yang solid. Kelompok ini sering menjadi sarana berbagi informasi dan sumber daya.
5	Koperasi	Organisasi peternak yang membantu peternak memenuhi kebutuhan ternaknya dan memasarkan telur	Tinggi dalam mendukung peternak dengan akses ke pasar dan sumber daya, serta melindungi peternak dari fluktuasi harga.



No	Aktor	Peran	Kuasa
6	Poultry Shop	Individual atau perusahaan yang menyediakan sarana produksi ternak kepada mitra peternak (plasma).	Sedang, karena mereka menyediakan barang yang dibutuhkan peternak tetapi bukan aktor utama dalam pengambilan keputusan strategis di rantai pasok.
7	Pedagang/ Pengepul	Individu atau kelompok yang membeli telur dari peternak dan memiliki jalur penjualan sampai ke konsumen	Tinggi dalam menentukan harga jual telur di tingkat peternak kecil dan menengah.
8	Perusahaan DOC	Perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan DOC	Sangat tinggi, karena mereka mengontrol kualitas awal dari siklus produksi peternakan.
9	Perusahaan Pakan	Perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan Pakan	Sangat tinggi, mengingat pakan adalah komponen biaya terbesar dalam produksi telur.
10	Perusahaan Obat Hewan	Perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan obat, vaksin, dan desinfektan (OVD)	Tinggi, terutama dalam menjaga kesehatan ternak.
11	Pemerintah Daerah	Institusi pemerintah di daerah yang bekerja untuk menyediakan peraturan/kebijakan yang berhubungan produksi telur.	Pemerintah daerah memegang kuasa dalam penyusunan regulasi dan kebijakan lokal yang mendukung peternakan, seperti penyediaan subsidi atau program pelatihan peternak.
12	Pemerintah Pusat	Kementerian yang bekerja untuk menyediakan peraturan/kebijakan yang berhubungan produksi telur	Memiliki otoritas tinggi dalam mengatur kebijakan nasional yang memengaruhi rantai pasok, seperti regulasi impor pakan atau kontrol harga produk unggas.

Secara umum peternak di Kabupaten Blitar merupakan peternak mandiri yang menjalankan usahanya sendiri tanpa ada perjanjian kontrak dengan pihak ketiga (kemitraan). Peternak mandiri menanggung semua biaya produksi sendiri



la risiko dan keuntungan yang timbul dari keputusan mereka. tikan *Day Old Chicken* (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin, eralatan dari pemasok; serta hasil produksi telur kemudian ing dan/atau melalui perantara tengkulak (*middleman*).

< umum peternak ayam ras petelur di Kabupaten Blitar ai aktor yang memiliki komitmen dan mendedikasikan tenaga majuan usahanya. Peternak memiliki sikap keterbukaan dalam

upaya memenuhi permintaan konsumen dan memperkuat hubungan pasar. Peternak lebih cenderung mencari struktur pembiayaan yang tepat dan mudah dengan berbagi pengetahuan antara pendatang baru dan yang sudah berpengalaman. Peternak selalu berorientasi keuntungan dan aktif terlibat dalam asosiasi. Untuk peternak rakyat, karakter spesifik yang juga muncul yaitu kecenderungan memiliki praktik dan pengalaman tradisional, menginvestasikan modal sendiri, dan menjadikannya sebagai pekerjaan keluarga. Sedangkan peternak skala perusahaan, tambahan karakter spesifik yang dimiliki yaitu kecenderungan memiliki pekerja terampil atau berpengalaman, dan berupaya mengendalikan biaya usaha. Data jumlah peternak ayam ras petelur di Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Jumlah peternak ayam ras petelur di Kabupaten Blitar per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Peternak
1.	Ponggok	796
2.	Kademangan	591
3.	Srengat	283
4.	Wonodadi	193
5.	Nglegok	173
6.	Selopuro	160
7.	Talun	154
8.	Udanawu	135
9.	Bakung	132
10.	Wates	112
11.	Gandusari	109
12.	Binangun	57
13.	Kesamben	51
14.	Garum	51
15.	Sanankulon	46
16.	Doko	44
17.	Sutojayan	34
18.	Panggungrejo	33
19.	Wonotirto	30
20.	Selorejo	30
21.	Kanigoro	28
22.	Wlingi	24
Jumlah		3.267

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Blitar 2023 (tidak dipublikasikan)

Peternak kecil. Peternak ayam ras petelur di Kabupaten Blitar didominasi oleh peternak kecil yang memiliki ternak kurang dari 11.500 ekor—sesuai dengan



). Peternak kecil memiliki kuasa bebas untuk menentukan ras petelur yang dipelihara sesuai dengan kemampuan modal peternak kecil juga memiliki kuasa untuk menentukan fase pemeliharaan ternak dari fase DOC atau fase pulet. Kemampuan yang dimiliki oleh peternak kecil akan menentukan kemampuan peternak kecil dalam menyediakan pakan dilakukan dengan cara menyusun formulasi pakan (self-mixing) dengan mencampur bahan pakan lokal tersedia

(dominan jagung) dan pakan konsentrat asal pabrik. Peternak kecil memiliki kuasa untuk bebas memilih tempat membeli pakan/obat dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan produksi pakan *self-mixing* tersebut dilakukan dalam skala kecil mengingat minim/terbatasnya modal yang dimiliki. Produksi pakan *self-mixing* lebih menguntungkan dan mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan bersih peternak (Afandi et al., 2020). Produk telur dipasarkan melalui jasa koperasi atau tengkulak (*middleman*) dimana peternak kecil bebas menentukan tengkulak yang paling menguntungkan, meskipun peternak kecil tidak mampu menentukan harga telur. Kelembagaan koperasi dan kelompok tani ternak menjadi wadah bagi peternak ayam ras petelur dalam upaya konsolidasi pengembangan usahanya. Peternak kecil memiliki kuasa untuk bebas terlibat dalam keanggotaan suatu koperasi atau kelompok tani ternak, meskipun ada juga peternak kecil yang memilih untuk tidak berkelompok. Penyampaian aspirasi kepada pemerintah terkait permasalahan atau isu yang berdampak negatif pada usaha peternakan ayam ras petelur juga disuarakan oleh peternak kecil melalui beragam aksi demonstrasi. Kondisi kuasa yang dimiliki peternak kecil terhadap aktor lainnya menjadikan kemampuan memilih dan mengakses sumber permodalan menjadi terbatas. Salah satu contoh adalah Suroto, seorang peternak ayam kecil dari Blitar, yang menjadi sorotan publik setelah aksinya membentangkan poster saat kunjungan Presiden Jokowi di Blitar pada September 2021. Aksinya yang viral menarik perhatian Presiden, yang kemudian memberikan bantuan berupa dua truk jagung pipil kering berkualitas internasional sebanyak 20 ton. Cerita Suroto mencerminkan bagaimana aspirasi peternak kecil disampaikan kepada pemerintah terkait permasalahan yang mereka hadapi, seperti harga pakan yang tinggi dan harga jual telur yang rendah. Aksi Suroto yang viral berhasil menarik perhatian pemerintah dan menekankan pentingnya suara peternak kecil dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Demonstrasi dan aksi semacam ini menunjukkan bahwa dukungan dan respons cepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu mereka bertahan dan berkembang.

Untuk mencapai tujuan atau *goal* yang diharapkan dari usaha beternak ayam ras petelur, peternak kecil memiliki kepentingan untuk mendapatkan harga input produksi (DOC, pakan, OVD) yang rendah, tersedia selalu saat dibutuhkan, dan mudah diakses. Rendahnya harga input produksi diharapkan didukung oleh harga jual telur yang tinggi sehingga peternak kecil mendapatkan keuntungan. Peran pemerintah dalam pemberdayaan peternak memberikan peluang bagi peternak kecil untuk mendapatkan atau mengakses bantuan sarana produksi ternak (saprotrak). Mendapatkan bantuan pemerintah tersebut tentunya menjadi salah satu harapan atau keinginan peternak kecil. Selain itu, peternak kecil juga memiliki kepentingan untuk dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan memanfaatkan semua potensi ekologi, sosial dan ekonomi yang



in pasar ditengah situasi kompetisi yang semakin ketat dan
rtu jaminan ketersediaan bahan pakan diharapkan akan
ampunan peternak kecil mengembangkan usahanya. Dinamika
d sering membuat peternak kecil berada pada situasi yang

kurang menguntungkan. Peningkatan harga telur dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah dan/atau pemerintah daerah menginisiasi dilaksanakannya operasi pasar. Kegiatan tersebut berdampak pada turunnya minat pedagang/pengepul membeli telur dari peternak kecil sehingga harga telur di tingkat peternak kecil menjadi turun. Peternak kecil berharap pelaksanaan operasi pasar hanya dilakukan pada saat kondisi harga telur yang stabil tinggi selama kurun waktu 2-3 bulan. Pelaksanaan operasi pasar yang terlalu dini, akan menyebabkan kerugian bagi peternak kecil. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya populasi ternak di peternak kecil. Pandemi Covid-19 berdampak pada keuangan, transportasi, dan konsumsi produk unggas (Samad et al., 2022; Sholihin et al., 2022). Sehingga kepentingan saat ini yaitu mengembalikan populasi seperti populasi sebelum Covid-19. Dalam upaya *recovery*, peternak kecil berkepentingan untuk mendapatkan kemudahan akses sumber modal diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Peternak menengah. Berdasarkan Permentan Nomor 14 Tahun 2020, peternak menengah memiliki ternak antara 11.500–234.000 ekor. Peternak menengah memiliki modal besar dan memiliki kuasa untuk menentukan jumlah ternak yang dipelihara. Peternak menengah juga memiliki kuasa untuk bebas menentukan pemeliharaan ternak dimulai dari fase DOC atau fase pulet. Kemampuan kepemilikan ternak akan menentukan kemampuan memproduksi telur. Peternak menengah berkuasa untuk menentukan cara penyediaan pakan yaitu melalui *self-mixing* atau membeli pakan asal pabrik. *Self-mixing* dilakukan dengan menggunakan bahan pakan lokal yang tersedia, utamanya jagung ditambah pakan konsentrat asal pabrik. Peternak menengah juga berkuasa untuk menentukan sendiri formulasi dan bahan pakan yang digunakan dalam *self-mixing*. Kegiatan produksi pakan *self-mixing* tersebut dilakukan dalam skala menengah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dijual terbatas. Ketersediaan modal yang memadai menyebabkan peternak menengah secara bersama-sama atau berkelompok telah mampu membeli bahan pakan impor langsung dari importir. Produk telur dipasarkan secara mandiri dan melalui jasa tengkulak dengan menentukan sendiri tengkulak yang paling menguntungkan, meskipun tidak mampu menentukan harga pasar telur. Kelembagaan kelompok tani ternak menjadi wadah bagi peternak ayam ras petelur dalam upaya mengembangkan usahanya. Peternak menengah memiliki kuasa untuk bebas terlibat dalam keanggotaan suatu kelompok tani ternak, meskipun ada juga peternak yang memilih untuk tidak berkelompok. Penyampaian aspirasi kepada pemerintah terkait permasalahan atau isu yang berdampak negatif pada usaha digerakkan



(c) oleh peternak menengah agar disuarakan oleh peternak im aksi demonstrasi.

in bahan pakan menjadi kepentingan peternak menengah tersediaan pakan. Harga input produksi (DOC, pakan, OVD) lia selalu saat dibutuhkan, mudah dalam mengaksesnya, dan telur) yang tinggi, menjadi harapan peternak menengah untuk ntungan. Selain itu, peternak menengah juga memiliki

kepentingan untuk dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan semua potensi ekologi, sosial dan ekonomi yang dimilikinya.

Adanya jaminan pasar dan penataan tata niaga telur juga diharapkan untuk meningkatkan kemampuan peternak menengah melakukan ekspansi usahanya. Mengingat tingkat kontestasi usaha yang semakin kompetitif, peternak menengah memiliki kepentingan untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan daya saing. Harapannya yaitu skala usaha bertambah. Peningkatan skala usah memerlukan modal sehingga peternak menengah berkepentingan untuk mendapatkan kemudahan akses sumber modal dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Peternak besar. Peternak besar memiliki modal besar dengan skala kepemilikan ternak diatas 230.000 ekor—sesuai dengan Permentan 14/2020. Kuasa peternak besar dengan skala kepemilikannya mampu memproduksi telur dalam jumlah besar pula. Kemampuan memproduksi telur tersebut menjadikan peternak besar mampu membentuk dan menentukan harga jual telur di pasar. Penyediaan pakan dalam jumlah besar dilakukan dengan produksi pakan skala industri (industri besar atau industri menengah). Peternak besar memiliki kemampuan dalam membeli bahan pakan dalam jumlah besar. Selain digunakan untuk konsumsi sendiri, peternak besar juga memiliki kemampuan untuk menjual pakan. Peternak besar menguasai beberapa sumber daya input, termasuk memproduksi DOC dan pullet sendiri. Kemampuan penguasaan sumber daya input dan teknologi modern menjadikan usaha menjadi lebih efisien dan produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi. Kemampuan melakukan penetrasi pasar meningkatkan *trust* lembaga permodalan sehingga akses sumber-sumber permodalan menjadi terbuka. Peternak besar memiliki kuasa untuk membentuk peternak plasma dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Kuasa peternak besar tersebut mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan atau *goal* yang diharapkan dari usaha beternak ayam ras petelur, peternak besar memiliki kepentingan untuk mendapatkan harga input produksi (DOC, bahan pakan/pakan, OVD) yang rendah dan harga jual yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketersediaan pakan dan OVD kapan pun dibutuhkan. Peternak besar juga memiliki kepentingan untuk dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan semua potensi ekologi, sosial dan ekonomi yang dimilikinya. Peternak besar memiliki kepentingan untuk maju bersama peternak plasma. Adanya kontestasi mendapatkan tenaga kerja, peternak besar berkepentingan terhadap ketersediaan tenaga kerja. Skala usaha yang besar membutuhkan sumber daya



lah satunya ketersediaan air. Peternak besar berkepentingan n kemudahan dalam perizinan instalasi air tanah dalam. as produksi pakan yang besar, peternak besar berharap aan bahan pakan utamanya jagung dalam mendukung i dan dalam upaya ekspansi usaha. Regulasi yang mengatur ninan ketersediaan jagung menjadi hal yang diharapkan oleh tuk menjaga skala usaha secara konsisten dan untuk tujuan

ekspansi, peternak besar memerlukan tambahan modal sehingga berkepentingan untuk mendapatkan kemudahan akses sumber modal dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Kelompok Tani Ternak. Kelompok Tani Ternak (KTT) memiliki kuasa dalam menampung setiap aspirasi peternak untuk kemudian didiskusikan bersama dalam mencari solusi terbaik. KTT memiliki kuasa dalam mengakses bantuan pemerintah dan pemerintah daerah mengingat kelembagaan peternak berupa KTT menjadi syarat dalam mengakses bantuan. KTT memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pemasaran telur anggotanya kepada mitra atau konsumen. Masalah ketersediaan dan harga telur ayam merupakan permasalahan yang ada pada usaha pemasaran telur (Vicki Dwi Purnomo, 2023). Keberadaan peternak yang berkelompok akan mendorong usaha menjadi lebih efisien sehingga memiliki kemampuan mengakses pemasaran, penyuluhan dan pembinaan.

Kepentingan KTT terhadap usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yaitu melindungi kepentingan peternak, mempermudah peternak dalam mengakses input produksi (DOC, bahan pakan/pakan, OVD), dan memberikan kepastian pasar. Keberadaan KTT juga diharapkan mampu mengakses bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Partisipasi aktif seluruh anggota untuk memasarkan telur melalui KTT sangat diharapkan sehingga mampu meningkatkan posisi tawar. Untuk mengembangkan usahanya, KTT berkepentingan meningkatkan kualitas SDM peternak dan mengakses jalur pemasaran secara kolektif.

Koperasi. Koperasi memiliki kuasa membeli telur peternak dan memasarkannya. Harga beli telur ditentukan oleh koperasi. Koperasi juga dapat mengolah telur agar memiliki nilai tambah ekonomi saat dipasarkan. Koperasi memiliki kuasa dalam mengakses dan menyalurkan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Kelembagaan usaha berupa koperasi peternak menjadi salah satu syarat dalam mengakses bantuan. Keberadaan peternak yang tergabung dalam koperasi juga mendorong usaha menjadi lebih efisien sehingga memiliki posisi tawar yang kuat terhadap aktor lainnya termasuk ikut menentukan harga beli telur di anggota.

Kepentingan koperasi terhadap usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yaitu mendukung usaha sekaligus melindungi peternak. Koperasi berkepentingan membantu peternak mengakses input produksi sehingga dapat mengakses pembelian input produksi seperti DOC, pakan, OVD dengan harga yang murah (lebih rendah dari peternak lain). Meningkatnya jumlah peternak yang bergabung dan meningkatnya penjualan telur menjadi harapan koperasi. Kolektifitas peternak dalam mengakses pemasaran akan



peternak dalam posisi tawar sehingga diharapkan harga jual telur stabil (Acosta et al., 2022; Astrini et al., 2021; Kalangi et al.,

pengepul. Pedagang/pengepul dalam penelitian ini meliputi pedagang antar daerah/pulau, dan pengepul/tengkulak. I memiliki kuasa dalam menentukan peternak yang akan dibeli /pengepul memiliki kuasa memilih peternak yang akan diajak

kerjasama dan dapat memutuskan kerjasama sewaktu-waktu seperti ketika keuntungan berkurang. Pedagang/pengepul memiliki kuasa untuk menentukan harga telur, termasuk jumlah dan kualitas telur yang dibeli dari peternak serta metode pembayaran kepada peternak. Pedagang/pengepul telah memiliki referensi jalur penjualan telur sehingga memiliki kuasa untuk menentukan penjualan telur. Pedagang/pengepul juga memiliki kemampuan mempengaruhi isu yang berkembang untuk kepentingan bisnisnya (utamanya harga pembelian telur di level peternak dan harga jual ke konsumen). Pedagang memiliki kuasa untuk menentukan mitra pengepul dalam menjalankan usahanya. Perbedaan kuasa dan kepentingan antara pedagang lokal, pedagang antar daerah/pulau yaitu cakupan wilayah bisnisnya.

Kepentingan pedagang/pengepul terhadap usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yaitu mendapatkan harga beli telur yang rendah dan volume pembelian yang besar dengan harapan keuntungan semakin tinggi. Pedagang/pengepul berharap usahanya dapat berlanjut secara berkesinambungan dan mendapatkan kepercayaan dari peternak.

Poultry shop. Komponen pasokan dalam rantai usaha peternakan ayam ras petelur meliputi *Day Old Chicken* (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin, desinfektan, dan peralatan. Perusahaan besar mengambil posisi strategis dengan memiliki perwakilan anak perusahaan maupun kemitraan dengan *poultry shop* (PS) sehingga produk seperti DOC, pakan, obat, vitamin, vaksin, pakan suplemen, dan peralatan penunjang lainnya bisa didapatkan di PS. Perusahaan besar seperti Charoen Pokphand, CJ Feed, Anwar Sierad, Cargill, Japfa Comfeed, dan perusahaan lainnya juga menempatkan *sales* di masing-masing kecamatan dan aktif memberikan promosi dan penyuluhan ke peternak. *Poultry shop* disini berperan penting dalam menyediakan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk yang berhubungan dengan ternak. Peternak bergantung kepada *poultry shop* sehingga adanya kesenjangan informasi terhadap produk yang dipasok oleh pemasok dapat berdampak pada kinerja ternak. Sebagai contoh, hasil wawancara dengan peternak menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pemberian obat tidak efektif dampaknya bagi ternak. PS berperan sebagai pemasok yang menjual sarana produksi ternak (DOC, bahan pakan/pakan, OVD) bagi peternak. PS memiliki kuasa dalam menentukan mitra peternak (plasma) yang akan bergabung dan menawarkan produk yang dimiliki. PS memiliki kuasa dalam membeli telur dari peternak kecil dan menengah, serta menentukan harga penjualan DOC, pakan, dan OVD. Kepentingan PS terhadap usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya jumlah penjualan produk sapronak dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapronak serta hasil



sma. PS juga berharap usahanya dapat berlanjut secara dan mendapatkan kepercayaan dari peternak plasma.

daerah. Pemerintah daerah merupakan aktor yang berperan dalam usaha peternakan ayam ras petelur melalui aktivitas politis pemerintah daerah diterjemahkan dalam kebijakan dan berpengaruh dalam proses usaha peternakan. Pemerintah ini meliputi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan

kehatan hewan, fungsi perdagangan, dan fungsi sosial di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepada peternak dan petugas teknis. Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam memfasilitasi kepentingan peternak terkait akses sumber daya diantaranya modal, sarana produksi ternak, teknologi, dan pasar. Kuasa pemerintah daerah dapat berupa pengaturan subsidi pakan. Regulasi perizinan terkait usaha peternakan ayam ras petelur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, diantaranya memberikan izin-izin pengelolaan peternakan dan lahan, bertujuan untuk mengatur dan juga mengawasi kegiatan peternak meliputi pembibitan, produksi pakan/obat, pemasaran, dan pelayanan tenaga teknis.

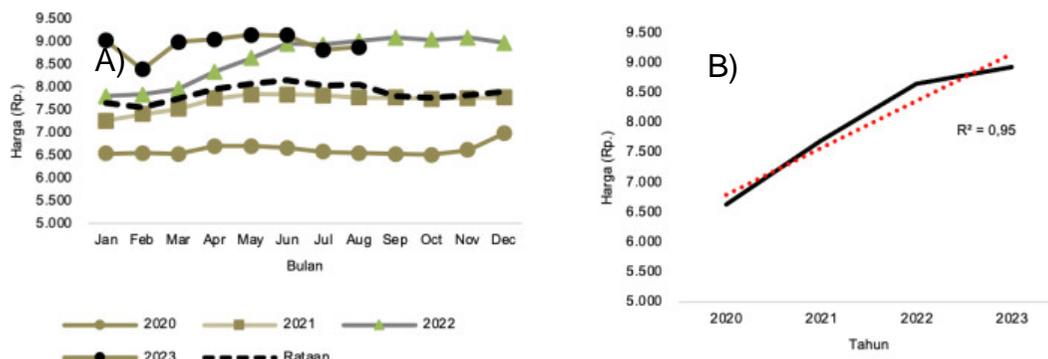
Kepentingan pemerintah daerah terhadap kuasa yang dijalankan yaitu ingin mensejahterakan peternak. Pemerintah daerah berharap dengan kuasa yang dimilikinya dapat menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha peternakan ayam ras petelur dan keberlanjutannya. Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha diharapkan juga mampu meningkatkan populasi ternak, produksi telur, dan menyediakan data serta informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peternakan ke depan.

Pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam penelitian ini meliputi Kementerian/Lembaga yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menangani atau bersinggungan dengan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, fungsi perdagangan, fungsi ketahanan pangan, dan fungsi sosial. Pemerintah pusat memiliki kuasa untuk menentukan jumlah produksi DOC secara nasional, memproyeksikan produksi telur, dan menentukan harga acuan telur. Pemerintah pusat memiliki kuasa untuk menyusun dan mengeluarkan regulasi terkait produksi bahan pakan/pakan, produksi telur dan harga telur. Kepentingan pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki yaitu adanya ketersediaan telur secara kontinyu dengan menciptakan keseimbangan produksi dan harga telur serta kestabilan produksi dan harga input produksi (DOC, bahan pakan/pakan, dan OVD). Pemerintah pusat berkepentingan untuk mensejahterakan peternak dan pelaku usaha lainnya. Pemerintah pusat berharap dengan kuasa yang dimilikinya dapat menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha peternakan dan keberlanjutannya. Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha diharapkan juga mampu menyediakan data dan informasi terkait produksi pakan/bahan pakan, populasi ternak, dan produksi telur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peternakan ke depan.

Perusahaan pakan. Produsen pakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kemampuan memproduksi pakan dalam skala industri yang dibutuhkan peternak dan petugas teknis. Aktor ini memiliki kemampuan harga pakan. Dalam proses produksi pakan, perusahaan tentukan formula atau komposisi bahan baku yang digunakan, dan mutu pakan yang akan diproduksi. Perusahaan juga untuk menentukan jalur dan wilayah distribusi produk yang dengan kebutuhan perusahaan. Dalam hal penjualan produk perusahaan memiliki kuasa terhadap cara atau metode atau tunda/hutang). Kemampuan produksi skala industri



tersebut menimbulkan dampak yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.



Gambar 2.3. Rataan harga pakan: (A) rataian harga pakan per bulan, dan (B) rataian harga pakan per tahun

Kepentingan perusahaan pakan dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pakan. Berdasarkan Gambar 2.3, rataian harga pakan konsentrat ayam petelur menunjukkan tren meningkat (R^2 95%) dari Rp. 6.600/kg pada tahun 2020 menjadi Rp. 8.900/kg pada tahun 2023 (Januari–Agustus 2023). Perusahaan pakan berharap harga jual pakan sesuai ekspektasi serta berharap adanya jaminan ketersediaan bahan baku pakan sehingga produksi pakan dapat berjalan secara berkesinambungan. Kelancaran produksi tentunya akan mendorong kelancaran *supply* produk ke konsumen sehingga volume penjualan dapat ditingkatkan. Perusahaan pakan juga berkepentingan memperluas segmentasi pasar dan meningkatkan jumlah pelanggan atau pengguna produk.

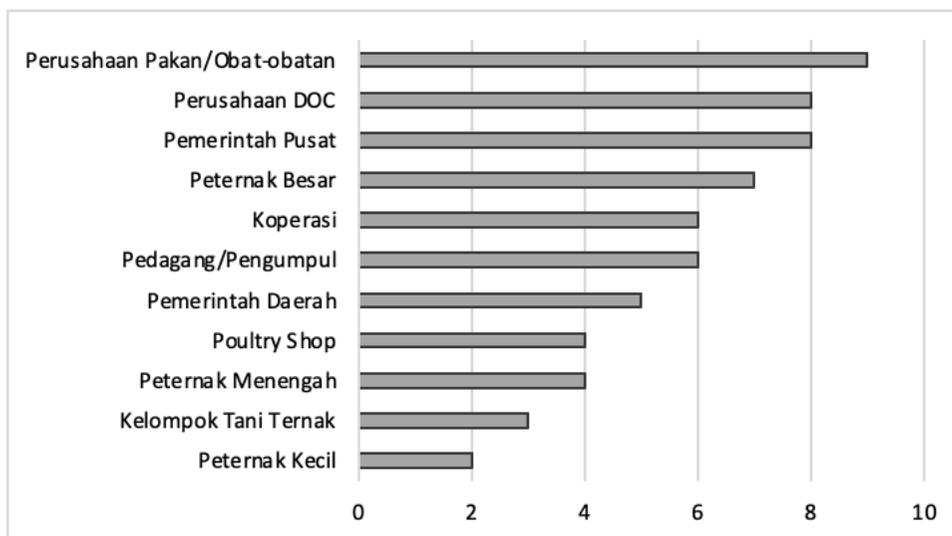
Perusahaan obat-obatan. Produsen obat-obatan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kemampuan memproduksi OVD (obat-obatan, vitamin, desinfektan) dalam skala industri yang dibutuhkan peternak dan petugas teknis. Aktor ini memiliki kemampuan untuk menentukan harga OVD. Dalam proses produksi OVD, perusahaan berkuasa untuk menentukan formula atau komposisi bahan baku yang digunakan, sumber bahan baku, dan mutu OVD yang akan diproduksi. Perusahaan juga memiliki kuasa untuk menentukan jalur dan wilayah distribusi produk yang dipasarkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam hal penjualan produk ke konsumen, perusahaan memiliki kuasa terhadap cara atau metode pembayaran (cash atau tunda/hutang). Kemampuan produksi skala industri tersebut menimbulkan dampak yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.



Perusahaan DOC. Produsen DOC dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kemampuan memproduksi DOC yang dibutuhkan oleh peternak. Perusahaan ini memiliki kuasa untuk memproduksi DOC dan menentukan harga jual DOC. Perusahaan ini berkuasa untuk menentukan strain ayam yang digunakan. Perusahaan ini berkuasa untuk menentukan harga jual DOC. Perusahaan ini berkuasa untuk menentukan strain ayam yang digunakan. Perusahaan ini berkuasa untuk menentukan harga jual DOC. Perusahaan ini berkuasa untuk menentukan strain ayam yang digunakan.

pasarnya. Peternak yang membeli DOC akan mengikuti metode atau cara pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemampuan produksi DOC skala industri tersebut menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Kepentingan perusahaan DOC dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan DOC. Perusahaan berharap adanya peningkatan volume penjualan dan adanya jaminan ketersediaan bahan baku sehingga produksi DOC dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.



Gambar 2.3. Grafik tingkat kuasa para aktor

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kuasa dalam rantai usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar sangat beragam, tergantung pada peran dan pengaruh masing-masing aktor. Peternak kecil, yang mengelola kurang dari 11.500 ekor ayam, memiliki kuasa yang sangat terbatas. Mereka sangat bergantung pada harga pasar yang ditentukan oleh pedagang, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap input produksi seperti pakan dan obat-obatan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan dinamika pasar. Peternak menengah, yang memelihara 11.500 hingga 230.000 ekor ayam, memiliki tingkat kuasa yang sedikit lebih besar karena akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pasar. Namun, mereka tetap memiliki daya tawar yang rendah dengan aktor yang lebih besar.



Peternak besar, dengan skala operasi lebih dari 230.000 ekor ayam, memiliki pengaruh signifikan dalam rantai pasok. Dengan skala produksi yang besar, mereka dapat mengakses pasar secara langsung dan memiliki kemampuan bernegosiasi dengan koperasi atau distributor besar. Di sisi lain, pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan peternakan, seperti subsidi dan pelatihan. Namun, kuasa pemerintah terbatas dibandingkan dengan aktor yang lebih besar.

mereka sering kali dibatasi oleh kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam menentukan regulasi nasional, seperti impor pakan atau kontrol harga telur. Pemerintah pusat menjadi salah satu aktor dengan pengaruh terbesar karena kebijakannya memiliki dampak langsung terhadap seluruh aktor dalam rantai pasok.

Perusahaan pakan dan obat-obatan muncul sebagai aktor yang paling dominan dalam rantai pasok peternakan ayam ras petelur. Produk mereka menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh peternak, dari skala kecil hingga besar. Fluktuasi harga pakan sering kali menentukan keberlanjutan usaha peternakan, sehingga posisi produsen ini sangat strategis. Demikian pula, perusahaan DOC, yang menyediakan bibit ayam, memegang kuasa besar karena kualitas bibit sangat memengaruhi keberhasilan produksi. Perusahaan obat hewan juga memiliki pengaruh besar karena produk mereka, seperti vaksin dan vitamin, menjadi kunci untuk menjaga kesehatan ternak.

Pedagang/pengumpul memainkan peran penting sebagai penghubung antara peternak dan pasar. Mereka memiliki kuasa yang cukup besar dalam menentukan harga beli telur dari peternak kecil dan menengah. Sementara itu, kelompok tani ternak dan koperasi menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung peternak melalui kolaborasi dan akses pasar. Namun, kuasa mereka cenderung terbatas karena pengaruh mereka hanya berlaku dalam lingkup tertentu. Poultry shop, yang menyediakan alat dan bahan bagi peternak, juga memiliki peran pendukung yang penting tetapi kuasanya tidak strategis dalam menentukan dinamika rantai pasok secara keseluruhan.

Temuan ini mengungkapkan bahwa aktor-aktor dengan akses terhadap input utama seperti pakan, DOC, dan obat-obatan memiliki kuasa tertinggi dalam rantai pasok. Produsen pakan, perusahaan DOC, dan pemerintah pusat menjadi aktor dengan pengaruh terbesar. Di sisi lain, peternak kecil, kelompok tani ternak, dan poultry shop berada di posisi paling bawah dalam hierarki kuasa, membuat mereka sangat bergantung pada aktor-aktor yang lebih kuat. Ketimpangan kuasa ini menunjukkan perlunya upaya strategis untuk memperkuat posisi peternak kecil dan menengah melalui penguatan daya tawar mereka, baik melalui kebijakan harga yang adil maupun dukungan dari koperasi dan pemerintah daerah.

2.5 Kesimpulan

Aktor dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar terdiri dari berbagai pihak yang mencakup peternak kecil, peternak menengah, peternak besar, pemerintah daerah, pemerintah pusat, produsen pakan/obat, kelompok tani ternak, koperasi, poultry shop, dan perusahaan DOC. Secara kelembagaan, kegiatan peternakan ini melibatkan tiga kelompok utama, yaitu kelembagaan hulu (obat-obatan, dan DOC), on-farm (peternak kecil, menengah, kelompok tani ternak dan koperasi), dan hilir (distribusi hasil pedagang/pengumpul).

Kelembagaan hulu dengan kuasa dan kepentingan tinggi didominasi oleh skala, kelompok tani ternak dan koperasi, serta pemerintah daerah. Poultry shop memiliki kepentingan tinggi terhadap peternak



kecil sebagai penyedia input skala kecil, sedangkan produsen pakan, obat-obatan, dan DOC lebih terfokus pada peternak menengah dan besar.

Relasi antaraktor dalam rantai usaha ini masih cenderung bersifat individual dan non-kemitraan, sehingga penerapan model peternakan ramah lingkungan menjadi tantangan yang besar. Peternak harus menanggung tanggung jawab mandiri dalam menerapkan model kandang close house atau menyediakan vaksin dan obat-obatan untuk ternak, yang sering kali terbebani oleh biaya tinggi, terutama saat pergantian musim. Situasi ini membuat keberlanjutan peternakan di tingkat kecil dan menengah lebih rentan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kuasa yang signifikan di antara para aktor. Aktor dengan kuasa terbesar adalah perusahaan DOC, perusahaan pakan, dan perusahaan obat hewan, karena mereka menguasai input utama yang menentukan keberlanjutan produksi. Pemerintah pusat juga memiliki kuasa besar melalui regulasi nasional yang memengaruhi pasar, seperti kebijakan impor, subsidi, dan kontrol harga. Di sisi lain, aktor seperti peternak kecil, kelompok tani ternak, dan poultry shop memiliki tingkat kuasa rendah karena sangat bergantung pada pasar, input produksi, dan kebijakan yang ditentukan oleh aktor yang lebih kuat. Peternak menengah dan koperasi memiliki kuasa sedang, memainkan peran penting dalam mendukung produksi tetapi tetap dipengaruhi oleh dinamika pasar dan kebijakan eksternal.

Penelitian ini menggarisbawahi adanya konsentrasi kuasa pada aktor yang menguasai sumber daya strategis, seperti pakan, DOC, dan obat-obatan, yang menciptakan ketergantungan besar bagi peternak kecil dan menengah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan penguatan daya tawar peternak kecil melalui pembentukan koperasi, pemberian subsidi untuk input produksi, serta kebijakan harga yang lebih adil. Selain itu, intervensi pemerintah daerah juga perlu diperkuat untuk mendukung peternak lokal dengan program-program yang relevan, seperti pelatihan teknis dan peningkatan akses pasar. Dengan demikian, keberlanjutan usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar dapat lebih terjamin, sekaligus menciptakan keseimbangan yang lebih adil di antara seluruh aktor dalam rantai usaha ini.

2.6 Daftar Pustaka

- Acosta, S., Chen, R., Nhemaphuki, S., Khanal, D., Cadena, M., Pitesky, M., Erbstein, N., & Niemeier, D., 2022. Assessing a pilot co-operative-based workshop-subsidy model toward improving small-scale chicken in peri-urban Nepal. *Translational Animal Science*, 6(3), [ps://doi.org/10.1093/tas/txac071](https://doi.org/10.1093/tas/txac071)
- , B., & Djunaidi, I., 2020. The Analysis of Production Costs of Farms Using Semi Self-Mixing and Total Self-Mixing Feeds in ncy, East Java. *Tropical Animal Science Journal*, 43(1), 70–[oi.org/10.5398/tasj.2020.43.1.70](https://doi.org/10.5398/tasj.2020.43.1.70)
- Putri, B. R. T., & Hellyward, J., 2021. Business strategy of s towards new normal era. *International Journal of Life*



- Sciences, 5(3), 148–155. <https://doi.org/10.53730/ijls.v5n3.1599>
- Badan Pusat Statistik., 2024. Kabupaten Blitar dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. Blitar.
- Caffyn, A., 2021. Broiler battles: Contested intensive poultry unit developments in a policy void. *Land Use Policy*, 105, 105415. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105415>
- Dijk, L. van, Buller, H., Blokhuis, H., van Niekerk, T., Voslarova, E., Manteca, X., Weeks, C., & Main, D., 2019. Hennovation: Learnings from Promoting Practice-Led Multi-Actor Innovation Networks to Address Complex Animal Welfare Challenges within the Laying Hen Industry. *Animals*, 9(1), 24. <https://doi.org/10.3390/ani9010024>
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar., 2021. Data Populasi Peternakan Ayam di Kabupaten Blitar. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan., 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 Revisi
1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.
- Febriandika, B., Iskandar, S., & Afriyatna, S., 2017. Studi Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Desa Gelebak dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.32502/jsct.v6i1.623>
- Hakim, A. L., 2019. Analisis aktor yang berperan dan mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang: studi di Kabupaten Pandeglang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1647>
- Heise, H., Crisan, A., Theuvsen, L., Heise, H., Crisan, A., & Theuvsen, L., 2015. The Poultry Market in Nigeria: Market Structures and Potential for Investment in the Market. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.207011>
- Hermanto, N., & Swastika, D. K. S., 2016. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371. <https://doi.org/10.21082/akp.v9n4.2011.371-390>
- Indonesia, K. P., 2014. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.
- Iyai, D. A., Mulyadi, M., Wajo, M. J., Naibey, R., Hayati, D. N., Noviyanti, N., Bajari, M., Koibur, J., Syufi, Y., Pakage, S., Inriani, N., Nuhuyan, L. E., Purba, J., Rahayu, B. W. I., Fatem, H., & Widayati, I., 2021. Defining and Valuing the Relationship Pattern of Actors' Involvement on Cattle Farming Systems using Stakeholder Network Analysis in West New Guinea, Indonesia. *Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal Veterinary Science)*, 11(3), 180. <https://doi.org/10.46549/jipvet.v11i3.112>
- tjap, A. K., & Lainawa, J., 2020. Cooperative Farming Concept and Development Strategy Model of Native Chickens in Province Sulawesi Tenggara Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 478(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-012009>



- Kidd, M. T., & Anderson, K. E., 2019. Laying hens in the U.S. market: An appraisal of trends from the beginning of the 20th century to present. *Journal of Applied Poultry Research*, 28(4), 771–784. <https://doi.org/10.3382/japr/pfz043>
- Klerkx, L., Aarts, N., & Leeuwis, C., 2010. Adaptive management in agricultural innovation systems: The interactions between innovation networks and their environment. *Agricultural Systems*, 103(6), 390–400. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2010.03.012>
- Mbiri, A., & Kushandajani, K., 2020. Power Relations in Developing Business of Cattle Farm in the District of West Tasifeto, Belu Regency, Indonesia's East Nusa Tenggara Province. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(1), 9–17. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i1.2886>
- Muharram, S., Fadly, F., Aldhaliaa, D., Pebriandini, R., & Nabila, F., 2021. Politics of Ecology On Environmental Management In Regional Autonomy Perspective In Banjar Regency. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 80–87. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v1i02.24>
- Nurfaidah, B. Y. D., & Rusdiyana, E., 2020. Perception of field agricultural extension on the implementation of the law on protection and empowerment of farmers (republic of Indonesia law number 19 of 2013) in grobogan regency. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 456. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/456/1/012083>
- Pelletier, N., Doyon, M., Muirhead, B., Widowski, T., Nurse-Gupta, J., & Hunniford, M., 2018. Sustainability in the Canadian Egg Industry—Learning from the Past, Navigating the Present, Planning for the Future. *Sustainability*, 10(10), 3524. <https://doi.org/10.3390/su10103524>
- Purnomo, M., Maryudi, A., Andriatmoko, N. D., Jayadi, E. M., & Faust, H., 2021. The Cost of Leisure: The Political Ecology of the Commercialization of Indonesia's Protected Areas. *Environmental Sociology*. <https://doi.org/10.1080/23251042.2021.2001990>
- Reviandy, O. P., Widiyanto, Rusdiyana, E., Rinanto, Y., & Sudibya., 2021. The role of farmer groups in the development of dryland farming in Ketos Village, Paranggupito Subdistrict, Wonogiri Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1), 012127. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012127>
- Rusdiana, S., Adiaty, U., Angga, A. R. H., & Diana, A., 2019. Analisis finansial usaha sapi perah dengan cara bagi hasil (paro) di peternak. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(1), 67–85. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i1.453>
- Salman, D., Kasim, K., Ahmad, A., & Sirimorok, N., 2021. Combination of Bonding, Bridging and Linking Social Capital in a Livelihood System: Nomadic Duck Herders Amid the Covid-19 Pandemic in South Sulawesi, Indonesia. *Forest and Society*, 136–158. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11813>
- M., Muazzam, A., Ahmer, A., Tariq, S., Ahmad, S., & Mumtaz, I., 2021. Current Perspectives on the Strategic Future of the Poultry Sector in the COVID-19 Outbreak. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 2(3), 90–100. <https://doi.org/10.47709/brilliance.v2i3.1597>
- Shagrim, M., Fatem, H., Pakage, S., Waromi, Y., Seseray, D., Arwam, H., Sangkek, M., & Iyai, D., 2020. Mapping Strategic and Sustainable Relevant Actors of Poultry Production and Business



- Using Stakeholder Network Analysis. *Jurnal Agripet*, 20(2).
<https://doi.org/10.17969/agripet.v20i2.16006>
- Sholihin, N., Haryuni, N., & Lestariningsih, L., 2022. The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Feasibility of the Laying Hens Business in Sumberejo Village, Blitar Regency, East Java Province, Indonesia. *Journal of Development Research*, 6(1), 131–136.
<https://doi.org/10.28926/jdr.v6i1.210>
- Svarstad, H., Overå, R., & Benjaminsen, T., 2018. Power theories in political ecology. *Journal of Political Ecology*, 25(1). <https://doi.org/10.2458/v25i1.23044>
- Udoye, C. E., Dimelu, M. U., Anugwa, I. Q., Ozioko, R. I., & Azubuike, F. C., 2019. Actors' Satisfaction with Poultry Value Chain Approach of the Commercial Agricultural Development Project in Enugu State, Nigeria. *Journal of Agricultural Extension*, 23(4), 157. <https://doi.org/10.4314/jae.v23i4.17>
- Vicki Dwi Purnomo., 2023. Efforts to Improve the Competitiveness of Chicken Egg Sales. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2).
<https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i2.2585>
- Vidyatmoko, D., & Rosadi, A. H. Y., 2015. Faktor Utama Kesuksesan Wirausaha di Industri Pangan. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 14(1), 47–65.
<https://doi.org/10.12695/jmt.2015.14.1.4>
- Wahyono, N. D., & Utami, M. M. D., 2018. A Review of the Poultry Meat Production Industry for Food Safety in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 953, 012125. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012125>
- Widianarko, B., 2009. Democratization, Decentralization and Environmental Conservation in Indonesia.
- Yuhuan, W., & Fu, Q., 2018. Analysis of Egg Price Fluctuation and Cause. *Journal of Agricultural Science*, 10(11), 581.
<https://doi.org/10.5539/jas.v10n11p581>

